

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.", Jenis Pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah [1].

Saat ini pengelolaan pajak daerah masih dilakukan secara manual, wajib pajak hanya dapat melakukan pendaftaran, monitoring berkas, dan pembayaran pajak daerah secara langsung dengan mendatangi kantor pelayanan pajak. Selain itu pengelolaan pajak secara manual memiliki resiko untuk terjadinya kehilangan berkas maupun kesalahan perhitungan pajak yang ditagihkan ke wajib pajak. Kesalahan data dalam berkas menjadi permasalahan yang cukup serius dikarenakan pengelolaan pajak daerah menggunakan kertas khusus yang memiliki nomor seri. Sehingga proses pelayanan pajak daerah membutuhkan waktu yang cukup lama.

Oleh karena diperlukan suatu Sistem informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya pajak daerah yang bersifat cepat, akurat, dan realtime mendorong pemerintah daerah untuk berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan mampu mengimplementasikan bisnis proses pengelolaan Pendapatan Daerah

khususnya Pajak Daerah ke dalam suatu Sistem Informasi Pengelolaan pendapatan Daerah yang dapat membantu pekerjaan Badan Keuangan Daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya pajak daerah. Selain itu, hal ini dilakukan guna mendukung Reformasi Birokrasi dan *E-Government* serta pelaksanaan Tata Kelola Keuangan yang handal, Akuntabel, dan Transparan.

Sistem juga diintegrasikan ke semua aplikasi pendukung baik dari entitas Pemerintah daerah Kota Pontianak maupun Entitas di luar Pemerintah Kota Pontianak. Dengan adanya pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah akan mendukung terciptanya pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan sistem pengendalian *intern* yang handal dalam penyajian data pajak daerah secara *realtime*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas dapat dirumuskan sebuah masalah, yaitu:

- a. Bagaimana cara membuat sistem informasi pajak yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pajak daerah.
- b. Bagaimana cara membuat sistem yang dapat meminimalisir resiko kesalahan maupun kehilangan data terkait pelayanan pajak daerah.
- c. Bagaimana cara membuat sistem yang dapat mengatasi kesalahan perhitungan tagihan maupun piutang yang akan ditagihkan ke wajib pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait pendaftaran, monitoring, dan pembayaran pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam proses bisnis pelayanan sampai dengan pelaporan secara *realtime* yaitu dimulai dari "*E-NPWP*(Elektronik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), *E-SPTPD*(Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), *E-BILLING*, *E-SKPD* (Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah) s/d *E-Reporting* termasuk penyajian data, pengawasan dan penindakan.

1.4 Batasan Masalah

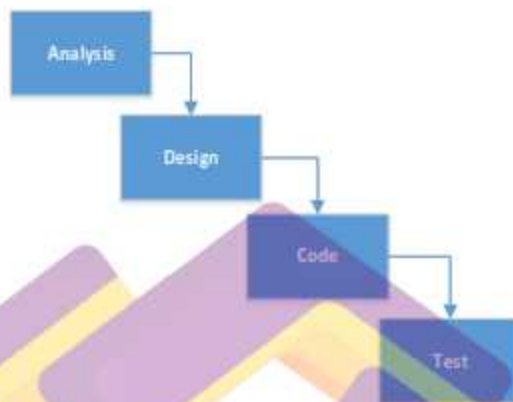
Dalam membuat tugas akhir ini diperlukan ruang lingkup atau batasan untuk mempersempit pembahasan, maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Penyediaan aplikasi (*software*) Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya pajak daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan;
- b. Mengakomodir bisnis proses pengelolaan pajak daerah ke dalam aplikasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Penyediaan prosedur pengoperasian aplikasi (*software*) agar dapat dioperasikan secara mandiri oleh ASN BKD Kota Pontianak;
- d. Terpenuhinya lisensi dan garansi pemakaian serta terlaksananya pendampingan pelaksanaan aplikasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;
- e. Aplikasi yang tersedia dapat mengakomodir Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, serta dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kota Pontianak dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang telah terpasang maupun yang belum terpasang baik di dalam entitas pemerintah Kota Pontianak maupun diluar entitas Pemerintah Kota Pontianak.

1.5 Metode Penelitian

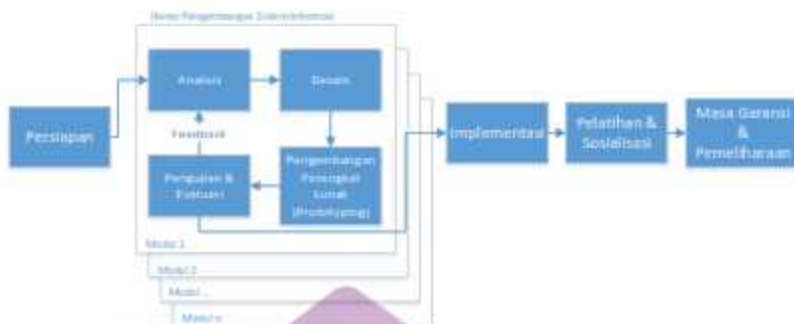
Pembangunan perangkat lunak aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah ini menggunakan metodologi perangkat lunak berupa model *Rapid Application Development (RAD)*. Model ini merupakan bentuk iterasi model sekuensial linear (sering disebut juga model *Waterfall*). Iterasi ini didasarkan pada penguraian konstruksi berdasarkan komponen yang terdapat pada aplikasi. Untuk sebuah iterasi yang menghasilkan sebuah komponen spesifik dari aplikasi melewati tahapan proses yang sesuai dengan model *Sekuensial Linear* yang diakhir iterasi terdapat prototipe komponen yang verifikasi oleh pengguna. Namun meski melibatkan adanya prototipe model ini berbeda dengan metodologi menggunakan model Prototipe pada model RAD perlu dipastikan kebutuhan fitur

beserta input, proses dan outputnya Gambar 1.1 Model Sekuensial Linear (Waterfall).



Gambar 1.1 Model Sekuensial Linear (Waterfall)

Model RAD yang digunakan memungkinkan penggunaan kembali komponen yang telah dibuat pada iterasi sebelumnya selain sifat modular dari pengembangan aplikasi keseluruhan. Hal ini menyebabkan pengerjaan pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat. Selain itu keberadaan prototipe untuk setiap komponen yang telah dibuat dapat segera dicek oleh pengguna untuk memastikan bahwa setiap pengembangan bagian aplikasi telah dibuat sesuai dengan keinginan/rencana. Hal ini menyebabkan proses pengembangan menjadi lebih efektif menangani kesalahan lebih awal. Selain itu pendokumentasian terkait *source code* komponen yang telah dibuat dapat dilakukan sesaat dibuatnya komponen tersebut sehingga proses pendokumentasian aplikasi dapat dilakukan relatif paralel sejalan dengan pengembangan aplikasi sehingga didapatkan efisiensi dari sisi waktu pengiriman (serah terima) proyek Gambar 1.2 Model Rapid Application Development (RAD).



Gambar 1.2 Model Rapid Application Development (RAD)

1.5.1 Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui alur *workflow* yang berjalan di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu, Tujuan lain adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan di lapangan, sehingga peneliti dapat membuat perancangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

1.5.2 Metode Wawancara

Tahapan wawancara merupakan tahapan awal dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan untuk menganalisis masalah, menganalisis kebutuhan sistem, dan menganalisis *workflow* yang sedang berjalan.

1.5.3 Metode Analisis

Tahapan analisa merupakan fase untuk membuat analisa *workflow* yang sedang berjalan. Hal ini disebabkan bahwa hasil akhir produk akan sangat dipengaruhi oleh data – data yang berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi pada tahapan ini.

1.5.4 Metode Perancangan

Tahapan perancangan produk dilakukan setelah semua data – data yang dibutuhkan telah dikumpulkan dan diidentifikasi. Tahapan desain pada umumnya digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan dibangun secara detail baik konsep maupun tujuan akhirnya, mulai dari desain *workflow* manajemen maupun desain alur pemrograman sistem yang diperlukan.

Pengembangan adalah proses pengkodean program aplikasi sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Dalam tahapan ini dilakukan penulisan kode program, pengujian baik per unit maupun per modul, *debugging / troubleshooting*, dan perawatan secara khusus terhadap kode program dari kemungkinan kesalahan logika yang dituliskan sehingga membuat aplikasi yang dibangun menjadi berhenti atau tidak bekerja sesuai dengan desain yang sudah ditentukan.

Pengujian perangkat lunak merupakan investigasi yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang kualitas produk atau jasa yang diuji. Pengujian juga dapat digunakan sebagai sumber pandangan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan sehingga pengguna bisa memahami risiko perangkat lunak yang digunakan.

Pengujian perangkat lunak dapat dinyatakan sebagai proses untuk memvalidasi dan memverifikasi bahwa sebuah aplikasi:

- a. Memenuhi persyaratan yang telah digambarkan pada tahapan desain dan pengembangan.
- b. Bekerja seperti yang diharapkan.
- c. Dapat diimplementasikan dengan karakteristik yang sama dan memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penyajian laporan tugas akhir ini mudah dipahami dan tertata dengan rapi, adapun struktur penulisan laporan yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, batasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka, dan dasar teori yang menjadi landasan konsep penyelesaian masalah.

BAB III TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum terhadap objek yang dijadikan acuan penelitian, analisis kebutuhan sistem, alur magang, hasil pengumpulan data, serta solusi yang ditawarkan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai pembahasan analisis data – data yang didapatkan dari hasil penelitian dan pengujian terhadap objek yang diambil. Pada bab ini akan dijelaskan tentang perancangan sistem, perancangan basis data, dan perancangan *user interface*

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan beberapa saran – saran demi lebih baiknya penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai sumber ataupun referensi yang digunakan dalam penulisan penelitian dari awal hingga akhir.

LAMPIRAN

Bagian ini merupakan bagian dari akhir penyusunan laporan yang berisi file-file pendukung penelitian.

